

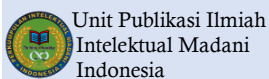
**EVALUASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR
DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR*****EVALUATION OF COASTAL COMMUNITY EMPOWERMENT POLICY
IN SELAYAR ISLANDS REGENCY*****Andi Azka Azizah¹**

Program Studi Magister
Administrasi Publik,
Jurusan Ilmu
Administrasi, Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas
Hasanuddin¹
email:
andiazkaazizah@gmail.com

**Mohamad Thahir
Haning²**

Program Studi Magister
Administrasi Publik,
Jurusan Ilmu
Administrasi, Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas
Hasanuddin²
email:
thahir.haning@gmail.com

IJI Publication
p-ISSN: 2774-1907
e-ISSN: 2774-1915
Vol. 6, No. 1, pp. 28-36
Nopember 2025



Abstrak: Kemiskinan dikalangan masyarakat pesisir masih menjadi tantangan utama pembangunan di Indonesia, khususnya di Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah melaksanakan program konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) melalui bantuan mesin konverter bagi nelayan kecil. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan program konversi tersebut di Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar dengan menggunakan enam indikator evaluasi kebijakan William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan teknik *pattern matching* untuk membandingkan data empiris dengan kerangka konseptual, serta diuji keabsahannya melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator efisiensi, kecukupan, dan pemerataan telah tercapai dengan baik, yang tercermin dari kelancaran proses distribusi serta kesesuaian program dengan tujuan untuk menurunkan biaya operasional nelayan dan memastikan penerima bantuan yang tepat sasaran. Namun demikian, indikator efektivitas, responsivitas, dan ketepatan belum tercapai secara optimal karena hanya 19 dari 69 informan (27,53%) yang masih menggunakan mesin konverter sesuai dengan tujuan program. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun program ini telah mencapai sebagian keberhasilan, masih diperlukan upaya lanjutan untuk meningkatkan pemanfaatan jangka panjang serta memperkuat responsivitas penerima manfaat dalam rangka mendorong keberlanjutan dan kemandirian ekonomi masyarakat pesisir.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan Publik; Pemberdayaan Masyarakat; Masyarakat Pesisir; Bantuan Mesin Konverter; Kabupaten Kepulauan Selayar.

Abstract: Poverty among coastal communities remains one of the major development challenges in Indonesia, particularly in Parak Village, Bontomanai District, Selayar Islands Regency. To address this issue, the government implemented a fuel conversion program from gasoline (BBM) to gas fuel (BBG) through the distribution of converter engine assistance for small-scale fishermen. This study aims to evaluate the implementation of the conversion policy in Parak Village, Bontomanai District, Selayar Islands Regency, using six policy evaluation indicators proposed by William N. Dunn: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. This research employs a descriptive qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews, direct observation, and documentation. The data were analyzed using the pattern matching technique to compare empirical findings with the conceptual framework, and data validity was tested through source and method triangulation. The results show that the indicators of efficiency, adequacy, and equity have been successfully achieved, as reflected in the smooth distribution process and the program's alignment with its objective to reduce fishermen's operational costs and ensure appropriate target recipients. However, the indicators of effectiveness, responsiveness, and accuracy have not been optimally achieved, as only 19 out of 69 informants (27.53%) continue to use the converter engines as intended. These findings indicate that although the program has achieved partial success, further efforts are required to enhance long-term utilization and strengthen beneficiaries' responsiveness to promote sustainability and the economic independence of coastal communities.

Keywords: Public Policy Evaluation; Community Empowerment; Coastal Communities; Converter Engine Assistance; Selayar Islands Regency.

PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat pesisir telah menjadi strategi pembangunan global untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan mendorong pemanfaatan

sumber daya laut secara berkelanjutan (FAO, 2021; World Bank, 2020). Di negara berkembang seperti Indonesia, isu ini sangat penting karena jutaan penduduk bergantung pada perikanan skala kecil sebagai sumber

mata pencaharian. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengakui desa sebagai entitas yang memiliki kewenangan mengatur urusannya sendiri dan mendorong pemberdayaan masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan umum serta kemandirian lokal. Idealnya, perumusan kebijakan publik dalam konteks ini harus melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk masyarakat pesisir, agar permasalahan mendasar dapat diatasi secara komprehensif (Ra'is, 2017).

Masyarakat pesisir di Indonesia menghadapi tantangan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang kompleks. Kemiskinan struktural, terbatasnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta rendahnya daya beli menyebabkan wilayah pesisir tertinggal dibanding sektor lainnya. Oleh karena itu, pemerintah pusat maupun daerah telah meluncurkan berbagai kebijakan berbasis pemberdayaan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir secara berkelanjutan. Salah satu wilayah yang menggambarkan kondisi ini adalah Kabupaten Kepulauan Selayar, yang memiliki potensi besar di sektor kelautan dan perikanan. Inisiatif lokal meliputi penyediaan alat tangkap, pembangunan infrastruktur perikanan, serta pelatihan bagi nelayan. Namun, inisiatif tersebut belum memberikan peningkatan signifikan terhadap kesejahteraan nelayan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip oleh Konita Iladini (2017), kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Selayar masih terkonsentrasi di wilayah pesisir. Tingginya angka putus sekolah, kondisi perumahan yang tidak layak, dan lemahnya daya beli menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan belum mencapai hasil yang diharapkan.

Salah satu program unggulan pemerintah adalah konversi dari Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) bagi nelayan kecil melalui distribusi mesin 6,5

HP dan tabung LPG. Meskipun program ini bertujuan untuk menurunkan biaya operasional dan meningkatkan efisiensi penangkapan ikan, tingkat pendapatan nelayan tetap stagnan. Selain itu, alih kewenangan pengelolaan kelautan dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi menyebabkan tumpang tindih tanggung jawab, inkonsistensi kebijakan, serta konflik antar nelayan (Rahman & Matsuda, 2020). Permasalahan ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat belum sepenuhnya terintegrasi dengan tata kelola maritim yang berkelanjutan.

Secara regional, kebijakan pemberdayaan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, yang mendefinisikan pemberdayaan sebagai pemberian fasilitas, dorongan, dan bantuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat pesisir dalam mengelola sumber daya secara berkelanjutan (BPK, n.d.). Pemberdayaan ini dioperasionalkan melalui pembentukan kelompok nelayan yang berfokus pada kegiatan penangkapan ikan, budidaya, maupun pengolahan hasil laut. Namun, efektivitas pendekatan ini belum dievaluasi secara sistematis.

Penelitian-penelitian sebelumnya seperti Manaf (2021) serta Neliyanti dan Heriyanto (2013) mengevaluasi program pemberdayaan dalam konteks yang berbeda dan menemukan tingkat efektivitas yang bervariasi. Manaf (2021) melaporkan bahwa pelaksanaan kebijakan umumnya berjalan optimal namun terbatas oleh kendala keuangan, sementara Neliyanti dan Heriyanto (2013) menemukan bahwa tidak satu pun dari indikator evaluasi utama seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan tercapai sepenuhnya. Meskipun demikian, masih terdapat kekurangan dalam evaluasi menyeluruh terhadap pemberdayaan masyarakat pesisir di tingkat pemerintah

daerah, terutama terkait keberlanjutan kebijakan dan koordinasi antar pemerintah

Berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini berfokus pada evaluasi kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir melalui program konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) bagi nelayan kecil di Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar dengan menggunakan enam indikator evaluasi William N. Dunn. Kebaruan penelitian ini terletak pada penerapan teori Dunn secara komprehensif untuk menilai efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan dalam satu program spesifik yang bersifat teknologis dan berbasis energi, bukan hanya sosial ekonomi seperti penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan model evaluasi kebijakan berbasis indikator multidimensi Dunn dan secara praktis menjadi rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat pesisir. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar. Penelitian ini berupaya mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun keterbatasan pelaksanaan kebijakan tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan memberikan gambaran yang komprehensif dan akurat mengenai evaluasi program pemberdayaan masyarakat pesisir di Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar. Data penelitian diperoleh melalui tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung di lapangan untuk meninjau pelaksanaan program bantuan

mesin konverter serta aktivitas nelayan penerima manfaat. Wawancara mendalam dilakukan terhadap informan kunci, yang meliputi pejabat pemerintah daerah, penyuluh perikanan, dan nelayan, dengan menggunakan panduan wawancara serta alat bantu perekam guna menjamin kelengkapan dan keakuratan data. Sementara itu, dokumentasi mencakup pengumpulan laporan, foto, dan berbagai bahan pendukung lain yang relevan dengan fokus penelitian.

Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada berbagai ketentuan normatif, seperti peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, serta norma sosial yang berlaku dalam masyarakat pesisir, guna memperkuat analisis terhadap pelaksanaan program. Data primer diperoleh secara langsung dari para informan melalui hasil wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder dihimpun dari studi kepustakaan, buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, serta sumber literatur lainnya yang relevan. Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan untuk memastikan konsistensi dan validitas temuan. Analisis data dilakukan melalui proses pengorganisasian, pengkategorian, dan sintesis informasi untuk mengidentifikasi pola serta menarik kesimpulan yang mendalam. Teknik *pattern matching* diterapkan guna membandingkan hasil temuan empiris di lapangan dengan kerangka konseptual penelitian, sehingga menghasilkan evaluasi yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah terhadap efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat pesisir.

HASIL DAN DISKUSI

Efektivitas

Efektivitas kebijakan publik menunjukkan sejauh mana hasil yang dicapai selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan. Suatu kebijakan dianggap efektif apabila output yang dihasilkan memberikan

kontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan program (Dunn, 2003). Semakin besar keterkaitan antara hasil yang diharapkan dengan hasil aktual, maka semakin tinggi tingkat efektivitas kebijakan tersebut (Mukherjee & Rayner, 2014).

Program konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) bagi nelayan kecil di Kabupaten Kepulauan Selayar bertujuan untuk menurunkan biaya operasional dan meningkatkan efisiensi penangkapan ikan. Secara konseptual, kebijakan ini bertujuan memperkuat pemberdayaan masyarakat pesisir melalui penghematan biaya dan peningkatan produktivitas nelayan (Rahman & Matsuda, 2020).

Hasil implementasi program menunjukkan manfaat ekonomi dalam bentuk efisiensi bahan bakar. Penggunaan konverter berbahan bakar gas dapat menurunkan biaya operasional hingga sekitar 68 persen dibandingkan bahan bakar konvensional. Namun, efektivitas program masih terbatas karena tingkat pemanfaatan bantuan oleh penerima masih relatif rendah. Hanya sekitar 27,53 persen penerima yang memanfaatkan konverter secara optimal, sementara 72,47 persen lainnya memilih untuk tidak menggunakan gas sebagai bahan bakar utama karena berbagai kendala teknis dan adaptasi terhadap teknologi baru. Fenomena rendahnya penggunaan teknologi baru dalam kebijakan masyarakat pesisir memang sering dijumpai dalam kajian evaluasi kebijakan (Fernandes, 2022).

Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan belum sepenuhnya tercapai. Meskipun tujuan penghematan biaya telah terealisasi, pelaksanaan di lapangan belum mampu mendorong perubahan perilaku dan meningkatkan kemandirian nelayan (Renyaaan, 2024). Hal ini selaras dengan pandangan bahwa efektivitas menilai sejauh mana hasil yang diinginkan telah dicapai dan

dampaknya terhadap sasaran (Febrianti et al., 2024).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa program konversi BBM ke BBG bagi nelayan kecil di Desa Parak Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar belum sepenuhnya efektif belum sepenuhnya efektif karena belum mendorong perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat pesisir secara berkelanjutan.

Efisiensi

Efisiensi menggambarkan sejauh mana upaya dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan penggunaan sumber daya seminimal mungkin. Dalam konteks kebijakan publik, efisiensi merujuk pada perbandingan antara input berupa tenaga, biaya, waktu, dan sumber daya dengan output atau hasil kebijakan yang dicapai (Lane, 2015). Semakin sedikit sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil optimal, semakin efisien suatu kebijakan (Mergoni & De Witte, 2021).

Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir melalui program konversi BBM ke BBG di Desa Parak Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan kinerja yang baik dari segi efisiensi administratif. Hal ini terlihat dari kesesuaian antara jumlah penerima yang diusulkan dan jumlah bantuan yang terealisasi pada tiga tahap pelaksanaan program.

Capaian tersebut menunjukkan keselarasan antara proses perencanaan dan pelaksanaan, yang menjadi indikator tata kelola program yang efisien. Keberhasilan ini tidak terlepas dari mekanisme verifikasi awal yang ketat untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar disalurkan kepada nelayan yang memenuhi syarat penerima. Proses ini mencerminkan efektivitas koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mengimplementasikan program nasional di tingkat lokal (Koura et al., 2024).

Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa efisiensi dalam kebijakan publik tidak

hanya soal pengurangan biaya, tetapi juga berkaitan dengan kualitas manajemen penggunaan sumber daya (Žubule & Kavale, 2016). Dengan demikian, berdasarkan kesesuaian antara jumlah usulan dan bantuan yang direalisasikan, serta manfaat ekonomi yang dirasakan nelayan berupa penghematan biaya bahan bakar dan peningkatan jarak jelajah, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan konversi BBM ke BBG di Desa Parak Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar cukup efisien.

Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik menggambarkan sejauh mana hasil kebijakan mampu menyelesaikan masalah yang menjadi sasaran serta memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat (Dunn, 2003). Kecukupan tidak hanya berkaitan dengan efektivitas hasil, tetapi juga tingkat kepuasan penerima manfaat dan dampaknya terhadap kondisi sosial masyarakat (Fernanto, 2022). Suatu kebijakan dianggap memadai apabila hasil yang dicapai tidak hanya sesuai dengan tujuannya, tetapi juga memberikan manfaat nyata tanpa menimbulkan masalah baru di masyarakat.

Pelaksanaan program konversi BBM ke BBG di Desa Parak Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan tingkat kecukupan yang relatif baik. Program ini memberikan manfaat langsung bagi masyarakat nelayan, terutama dalam menurunkan biaya operasional dan memperluas wilayah tangkap. Penggunaan bahan bakar gas telah menekan pengeluaran nelayan, sementara efisiensi bahan bakar memungkinkan aktivitas melaut yang lebih luas dan produktif (Zamroni & Yamao, 2021).

Dari sisi sosial, pelaksanaan program tidak menimbulkan konflik atau kecemburuan sosial di kalangan masyarakat pesisir karena distribusi bantuan yang merata (Chambers, 1995). Variasi dalam tingkat pemanfaatan bantuan lebih disebabkan oleh perbedaan

kemampuan teknis dan adaptasi nelayan terhadap penggunaan bahan bakar gas, bukan karena ketimpangan kebijakan (Renyaan, 2024).

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa program konversi BBM ke BBG di Desa Parak Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki tingkat kecukupan yang tinggi. Tujuan kebijakan telah tercapai baik dari aspek ekonomi melalui penghematan biaya dan peningkatan produktivitas, maupun dari aspek sosial melalui pemerataan manfaat dan minimnya potensi konflik di masyarakat pesisir.

Perataan

Perataan dalam kebijakan publik berkaitan dengan tingkat keadilan dalam distribusi manfaat, biaya, dan peluang bagi seluruh kelompok sasaran kebijakan (Rawls, 1971). Konsep ini berhubungan erat dengan rasionalitas hukum dan sosial, yang menekankan pentingnya pemerataan hasil kebijakan tanpa adanya diskriminasi atau ketimpangan (Fernandes, 2022). Suatu kebijakan dapat dikatakan berorientasi pada kesetaraan apabila dampak dan manfaatnya dirasakan secara merata oleh seluruh penerima, terlepas dari perbedaan sosial, ekonomi, maupun geografis.

Dalam konteks program konversi BBM ke BBG di Desa Parak Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar, prinsip kesetaraan tercermin dalam proses penentuan penerima dan pendistribusian bantuan. Pelaksanaan program ini didasarkan pada persyaratan yang jelas dan terukur, seperti kepemilikan kapal di bawah 5 GT, kepemilikan kartu nelayan Kusuka, serta ketersediaan mesin penggerak. Seluruh nelayan di Desa Parak yang memenuhi kriteria tersebut telah diakomodasi dalam program bantuan ini, menunjukkan bahwa penetapan sasaran telah sesuai dengan standar

pemberdayaan masyarakat pesisir (Dwiyanto, 2018).

Bantuan yang diterima juga seragam dari segi jenis dan spesifikasi, yaitu satu unit mesin katinting Honda 6,5 HP, dua tabung gas terisi penuh, satu selang tabung, serta perangkat konverter yang berfungsi menghubungkan mesin dengan bahan bakar gas. Distribusi bantuan dilakukan secara serentak di tingkat desa dengan disaksikan oleh pihak Dinas Perikanan dan pemerintah desa, sehingga memperkuat aspek transparansi dan memastikan pembagian yang adil di antara kelompok nelayan (Purwanto & Sulistyastuti, 2012). Keceragaman jenis dan jumlah bantuan antar kelompok nelayan juga mempertegas bahwa program ini tidak menimbulkan kecemburuan sosial ataupun ketimpangan manfaat di masyarakat pesisir.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa program konversi BBM ke BBG di Desa Parak Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar telah memenuhi prinsip kesetaraan. Seluruh penerima bantuan memperoleh manfaat yang sama baik dari segi jumlah, jenis, maupun kualitas. Dengan demikian, kebijakan ini dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang adil, transparan, dan tepat sasaran tanpa indikasi adanya diskriminasi di antara kelompok nelayan penerima manfaat.

Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik didefinisikan sebagai sejauh mana suatu kebijakan mampu memberikan tanggapan yang memadai terhadap kebutuhan, nilai, dan preferensi kelompok sasaran (Denhardt & Denhardt, 2000). Dimensi ini berfokus pada tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil pelaksanaan kebijakan, serta kesesuaian antara tujuan program dengan manfaat yang dirasakan oleh penerima (Mukherjee & Rayner, 2014).

Dalam konteks pelaksanaan program konversi BBM ke BBG bagi nelayan di Desa

Parak Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar, tingkat responsivitas masyarakat penerima menunjukkan hasil yang bervariasi. Sebagian kecil penerima memanfaatkan bantuan secara optimal dengan menggunakan Bahan Bakar Gas (BBG) sebagai sumber tenaga mesin, sehingga mampu menghemat biaya operasional dan memperluas wilayah tangkapan. Namun, sebagian besar penerima masih memilih menggunakan bensin meskipun telah menerima paket bantuan mesin konverter.

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan program dengan perilaku pemanfaatan di lapangan (Kaiser et al., 2023). Beberapa faktor penghambat teridentifikasi, seperti kekhawatiran masyarakat terhadap potensi bahaya kebakaran akibat penggunaan gas, serta keterbatasan pengetahuan teknis dalam mengoperasikan perangkat konverter (Rahman & Matsuda, 2020). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa meskipun tujuan kebijakan telah dikomunikasikan dengan baik, penerimaan masyarakat terhadap inovasi teknologi ini masih belum optimal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa responsivitas kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir di Desa Parak Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar melalui program konversi BBM ke BBG masih belum optimal. Meskipun secara struktural pelaksanaan program telah sesuai dengan target, secara substansial masih terdapat tantangan dalam aspek penerimaan dan pemanfaatan di tingkat penerima manfaat.

Ketepatan

Ketepatan dalam kebijakan publik menggambarkan sejauh mana hasil kebijakan benar-benar memberikan manfaat dan nilai bagi kelompok sasaran sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Dunn, 2003). Menurut Howlett & Ramesh (2020), ketepatan berkaitan dengan pertanyaan “apakah hasil

atau tujuan kebijakan benar-benar berguna dan bernilai bagi masyarakat.”

Dalam konteks program konversi BBM ke BBG bagi nelayan di Desa Parak Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar, ketepatan kebijakan dapat dilihat dari sejauh mana bantuan mesin konverter memberikan manfaat nyata bagi nelayan, seperti pengurangan biaya operasional dan perluasan jangkauan aktivitas melaut.

Namun, hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa pemanfaatan bantuan belum sepenuhnya selaras dengan tujuan utama program. Hanya sebagian kecil penerima yang benar-benar menggunakan tabung gas dan perangkat konverter sebagai sumber tenaga mesin. Sebagian besar penerima kembali menggunakan bensin meskipun telah menerima paket bantuan lengkap. Kondisi ini mengindikasikan bahwa manfaat ekonomi berupa penghematan biaya operasional dan peningkatan produktivitas belum sepenuhnya terwujud. Fenomena ini sesuai dengan kerangka bahwa meskipun desain program bagus, implementasi yang kurang tepat dapat menghambat ketepatan manfaat (Sabatier & Mazmanian, 1980).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketepatan kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir di Desa Parak Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar melalui program konversi BBM ke BBG belum tercapai secara optimal. Meskipun tujuan kebijakan telah dirumuskan dengan baik, keberhasilan implementasi masih bergantung pada efektivitas sosialisasi, pelatihan teknis, dan pembinaan berkelanjutan bagi masyarakat nelayan penerima bantuan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan kebijakan program pemberdayaan masyarakat pesisir melalui bantuan mesin konverter di Desa Parak, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten

Kepulauan Selayar, dapat disimpulkan bahwa implementasi program tersebut menunjukkan capaian yang beragam apabila ditinjau melalui enam indikator evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn (2003), yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Tiga indikator, yakni efisiensi, kecukupan, dan pemerataan, menunjukkan kinerja yang relatif baik. Pelaksanaan program dinilai efisien karena proses distribusi bantuan terlaksana sesuai prosedur dan tepat sasaran, sedangkan indikator kecukupan terlihat dari manfaat ekonomi berupa penghematan biaya operasional nelayan dan peningkatan produktivitas. Dari aspek pemerataan, kebijakan ini telah menunjukkan prinsip keadilan sosial melalui distribusi bantuan yang merata, transparan, dan bebas dari kecemburuan sosial di tingkat masyarakat penerima manfaat. Namun tiga indikator lainnya yaitu efektivitas, responsivitas, dan ketepatan, belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal ini ditunjukkan oleh rendahnya tingkat pemanfaatan bantuan, di mana hanya 19 dari 69 informan (27,53%) yang masih menggunakan mesin konverter sesuai dengan tujuan program. Rendahnya tingkat penggunaan disebabkan oleh faktor teknis, keterbatasan kemampuan operasional, serta rendahnya adaptasi terhadap teknologi baru. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberhasilan administratif belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan perilaku dan peningkatan kemandirian nelayan dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar melakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada calon penerima bantuan mengenai manfaat penggunaan mesin konverter sebelum proses penyaluran dilakukan. Selain itu, perlu dibuat perjanjian tertulis antara penerima bantuan dan pemerintah daerah untuk memastikan seluruh komponen bantuan digunakan secara lengkap

dan sesuai dengan tujuan program pemberdayaan. Dinas Perikanan juga perlu melakukan evaluasi menyeluruh dan berkelanjutan terhadap seluruh tahapan program, meliputi proses distribusi, kondisi bantuan, serta tingkat pemanfaatannya di lapangan. Hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar ilmiah dalam menentukan kelayakan dan keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat pesisir pada masa yang akan datang.

REFERENSI

- Akhmadi, A., Nugroho, A., & Wulandari, F. (2020). Persepsi keadilan dalam distribusi bantuan sosial: Studi pada masyarakat pesisir. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(3), 45–56.
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Planning Association*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- BPK. (n.d.). Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 10 Tahun 2011 Pengelolaan Wilayah Pesisir. Data Base. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/49003/perda-kab-selayar-no-10-tahun-2011>
- BPS Kab. Kep. Selayar. (2021). Indikator Kesejahteraan Rakyat Kab. Kep. Selayar. *Kesejahteraan Rakyat Budget Issue Brief; Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI*.
- Chambers, R. (1995). *Poverty and livelihoods: Whose reality counts?* Intermediate Technology Publications.
- Chuenpagdee, R., & Jentoft, S. (2022). Interactive governance for sustainable small-scale fisheries. *Coastal Management Journal*, 50(3), 245–261.
- Cicci, Y. M. (2021). Evaluasi kebijakan pemberdayaan masyarakat nelayan di Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali.
- Debby, R., Prabawati, S., & Winarto, W. (2015). *Evaluasi kebijakan publik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2000). The new public service: Serving rather than steering. *Public Administration Review*, 60(6), 549–559.
- Dunn, W. N. (2003). *Public policy analysis: An introduction* (3rd ed.). Prentice Hall.
- Dwiyanto, A. (2018). *Administrasi publik: Reformasi dan tata kelola pemerintahan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- FAO. (2021). *Coastal fisheries and community empowerment: FAO fisheries report*. FAO Publishing.
- Fernandes, M. (2022). Innovation adoption in coastal communities: Policy implications. *Coastal Management*, 50(2), 135–150.
- Hardcastle, C., Akintoye, A., Beck, M., & Chinyio, E. (2020). Public-private partnerships and governance in coastal infrastructure projects. *Sustainability*, 12(4), 1558.
- Howlett, M., & Ramesh, M. (2020). *Designing public policies: Principles and instruments*. Routledge.
- Islam, M. M., Sato, N., & Hossain, M. (2021). Coastal policy integration and community participation in developing countries. *Ocean & Coastal Management*, 212, 105789.
- Kaiser, M., Leite, L., & Silva, R. (2023). Barriers to community-based coastal policy implementation: Lessons from Southeast Asia. *Ocean & Coastal Management*, 245, 106002.

- Kaiser, M., Nursalim, A., & Putra, R. (2023). Resistance to technological innovation in fisheries policy implementation. *Journal of Coastal Policy*, 11(1), 50–64.
- Kumar, P., Tania, S., & Bhatta, R. (2022). Evaluating participatory governance in coastal resource management. *Marine Policy*, 142, 105261.
- Kumar, S., Maheshwari, R., & Singh, P. (2022). Policy coordination for local development: Case studies from Southeast Asia. *Public Policy Review*, 14(2), 101–117.
- Lane, J. E. (2015). *Public administration and public management: The principal-agent perspective*. Routledge.
- Mahsun, M. (2016). *Evaluasi kebijakan publik: Teori dan praktik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardiasmo. (2020). *Manajemen keuangan daerah dan evaluasi program*. Yogyakarta: Andi.
- Mergoni, M., & De Witte, K. (2021). Efficiency in public service delivery: Concepts and measurement. *Public Management Review*, 23(5), 723–740.
- Mukherjee, A., & Rayner, T. (2014). Assessing policy effectiveness: Methodological approaches. *Policy Studies Journal*, 42(3), 377–399.
- Neliyanti, & Heriyanto, M. (2013). Evaluasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.
- Purwanto, H., & Sulistyastuti, S. (2012). Transparansi dan akuntabilitas program pemberdayaan masyarakat pesisir. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 88–98.
- Ra'is, D. U. (2017). Kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam perspektif asas rekognisi dan subsidiaritas Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. *Reformasi*, 7(1), 29–46.
- Rahman, M. S., & Matsuda, Y. (2020). Evaluating community-based coastal resource management in Indonesia: Lessons learned and future directions. *Marine Policy*, 119, 104039.
- Rahman, S., & Matsuda, Y. (2020). Community-based energy programs for small-scale fishermen. *Energy Policy*, 140, 111428.
- Renyaan, L. (2024). Evaluasi program konversi BBM ke BBG pada nelayan kecil. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 16(1), 45–60.
- Sabatier, P., & Mazmanian, D. (1980). The implementation of public policy: A framework of analysis. *Policy Studies Journal*, 8(4), 538–560.
- William N. Dunn. (2003). *William-N.-Dunn-Pengantar-Analisis-Kebijakan-Publik-Gadjah-Mada-University-Press-2003_compressed-1.pdf*.
- Winarto, W. (dalam Prabawati, S., 2013). *Teori dan praktik evaluasi kebijakan publik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- World Bank. (2020). *Blue Economy Development Framework: Growing the Blue Economy to Combat Poverty and Accelerate Prosperity*. The World Bank Group.
- Žubule, I., & Kavale, S. (2016). Efficiency measurement in public administration: International perspectives. *Journal of Public Administration*, 10(3), 56–69.
- Zamroni, A., & Yamao, M. (2021). Empowerment and sustainability of coastal communities in Indonesia: Institutional perspectives. *Marine Policy*, 133, 104713.